

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Sejarah yang dimiliki oleh Semenanjung Korea selama hampir ratusan tahun itu bukanlah satu-satunya alasan Park Geun Hye dalam menerapkan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Masa lalu yang telah dilewati oleh Semenanjung Korea ini yang akhirnya menjelaskan posisi Korea Selatan dan Korea Utara hingga saat ini. Perpecahan ideologi yang dialami Semenanjung Korea ini sedikit banyak dipengaruhi oleh negara sekutu yang pada saat itu dunia sedang digoyahkan dengan rusuhnya kejadian Perang Dunia Kedua yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, sejak Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai menunjukkan eksistensinya di kawasan Semenanjung Korea, dari situlah perpecahan Semenanjung Korea terjadi. Perbedaan ideologi yang dimiliki kedua negara sekutu tersebut merupakan penyebab utama dari semua perpecahan ini. AS dengan ideologi liberalismenya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya mulai memberikan pengaruh terhadap masing-masing kawasan Selatan dan Utara di Semenanjung Korea. Kebijakan luar negeri Korea Selatan “*Trust Politic Policy*” inisiatif Park Geun Hye bukanlah kebijakan luar negeri pertama yang diterapkan pada Korea Utara.

Latar belakang yang dimiliki Park Geun Hye semasa hidupnya dapat dihubungkan dengan alasan mengapa Park Geun Hye memilih untuk menggunakan *Trust Politic Policy* sebagai kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara. Masa lalu yang begitu kelam yang harus dilalui oleh presiden wanita pertama Korea Selatan itu yang menjadikan *Trust Politic Policy* sebagai kebijakan luar negerinya terhadap Korea

Utara. Ayahnya yang merupakan mantan presiden ke-3 Korea Selatan ini memberikan trauma terberat bagi hidupnya karena ia harus kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya yang tidak sengaja tertembak dalam aksi percobaan pembunuhan terhadap Park Chung Hee, ayah dari Park Geun Hye. Hingga Park Chung Hee yang juga harus wafat di tangan orang terdekat keluarga mereka yang menjadi titik awal pengkhianatan terhadap Park Geun Hye.

Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang diusung Park Geun Hye ini merupakan kebijakan yang menyelaraskan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Korea Utara berdasarkan hasil dari hubungan kedua negara yang dimiliki sebelumnya. Penerapan *Trust Politic Policy* terhadap Korea Utara menurut level analisis individu sesuai dengan konsep *idiosyncratic* ini dilakukan oleh Park Geun Hye karena pengkhianatan yang telah dilaluinya di masa lalu sehingga ia merasa bahwa kepercayaan merupakan dasar pondasi yang harus dimiliki oleh hubungan antara Korea Selatan dan Utara. *Trust Politic Policy* sendiri menekankan kata ‘*trust*’ pada setiap upaya penerapan melalui program-program yang ada didalamnya. Dari ketiga program utama *Trust Politic Policy* yaitu *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI), *Eurasia Initiative* dan yang terakhir *Trust Building Process on the Korean Peninsula*, yang penerapannya melibatkan Korea Utara secara langsung hanyalah program yang terakhir. Dari program pembangunan kepercayaan yang diupayakan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara tersebut rupanya tidak menerima respon yang diharapkan. Sebaliknya, Korea Utara tidak yakin dengan niat yang diupayakan oleh Korea Selatan dalam membangun kepercayaan antar negara dalam memperbaiki hubungannya. Dari pondasi utama yang ditekankan oleh Park

dalam penerapan kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara merupakan suatu langkah dasar yang harus diterapkan pada kedua negara tersebut. Hal itu karena Semenanjung Korea terpecah karena kepercayaan terhadap ideologi yang berbeda hingga membuat mereka pada posisi ini. Upaya dan niat baik yang diterapkan Korea Selatan terhadap Korea Utara ini ternyata belum dapat diterima dengan baik namun dengan penuh kecurigaan oleh pihak Utara.

Saran penulis pada penelitian yang membahas topik serupa selanjutnya ialah lebih menganalisis terkait perilaku Park Geun Hye yang menggunakan “*trust*” sebagai pondasi dan konsep utama dalam kebijakan luar negerinya. Perilaku ini perlu dianalisis karena Park Geun Hye akhirnya harus ditarik secara paksa dari jabatannya sebagai presiden Korea Selatan karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan kehendak (BBC News Indonesia, 2018). Dari sini dapat diteliti lebih jauh dan mendalam terkait alasan Park menekankan kata “*trust*” pada kebijakannya namun dirinya sendiri tidak dapat menjaga “*trust*” itu sendiri. Hal ini bertolakbelakang dengan apa yang sudah ia gaungkan pada kebijakan luar negeri *Trust Politic Policynya* terhadap Korea Utara dengan tujuan mengembalikan rasa kepercayaan antar Semenanjung Korea.